

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH: DINKOMINFO

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2021 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		TT	AT	UK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																													
<b>INDIKATOR SASARAN</b>																													
	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	2,04	2,5	2,75	2,85	2,90	3,00	2,82	3,61	2,78				97,54		AT		92,67		AT			Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Kebutuhan yang tinggi akan penggunaan layanan SPBE  Aplikasi semakin lengkap dan efektif, layanan sudah semakin baik dan didukung dengan beberapa SOP yang sudah ada	masih sedikitnya kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE - belum terdokumentasi dengan baik tata kelola SPBE - masih rendahnya anggaran untuk pengembangan TIK - sedikitnya SDM di bidang TIK - masih adanya beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi	-Disusun kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE -Memperbaiki pendokumentasian tata kelola SPBE	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	77,90	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00	80,03	95,50	89,56				93,68		AT		93,3		AT		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai yang merepresentasikan kinerja dan kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Penilaian menjadi kewenangan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP, untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai yang merepresentasikan kinerja dan kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Penilaian menjadi kewenangan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP, untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	-Semangat PPIID Utama didorong dukungan dari seluruh stakeholder, baik PPIID OPD, Kecamatan dan Desa. -Website dan dashboard PPIID OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sudah difasilitasi oleh Dinkominfo -Monitoring, evaluasi, dan pendampingan rutin dilaksanakan oleh PPIID utama untuk menguatkan dan meningkatkan pemahaman serta kapasitasnya pelaku PPIID	-Ketersediaan anggaran dengan banyaknya badan publik yang menjadi tanggungjawab PPIID Utama. -Seringnya pergantian pelaku/admin PPIID pembantu yg mengakibatkan dibutuhkannya pembinaan dari awal.  <i>(Catatan menurut kerangka standar penilaian diturunkan oleh KIP, tetapi secara prestasi naik, karena kurang 0,54 ke kategori informatif)</i>	Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPIID Badan Publik dan mempersiapkan pengumpulan dokumen-2 yang disampaikan ke publik di awal tahun		
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																													
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPIID badan publik yang aktif	%	6,7	9	12	15	18	20	10,704	13,20	14,66			97,75		AT		73,31		AT		Jumlah PPIID badan publik yang aktif dibagi jumlah badan publik dikali 100%	Total PPIID: 341, PPIID aktif 45 (OPD, Kecamatan, Kel/Desa)	Pemahaman PPIID Badan Publik, baik tingkat OPD, Kecamatan dan Desa yang semakin baik dalam mewujudkan transparansi publik.	Load pekerjaan yang cukup tinggi di PPIID Badan Publik, sehingga pekerjaan yang terkait transparansi sering terabaikan.	Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas dengan PPIID Pembantu Badan Publik serta meningkatkan frekuensi kegiatan movev dan pendampingan dengan PPIID Badan Publik.		
		Jumlah PPIID badan publik yang aktif								38	45	50																	
		Jumlah PPIID badan publik								355	341	341																	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	5	10	15	20	25	30	15,63	15,63	21,88			100,00	TT			72,92		AT		Jumlah KIM yang aktif dibagi jumlah KIM yang ada dikali 100%	Jumlah KIM 32, yang aktif 5 KIM (di Kec. Bulu dan Kecamatan Jumo)	Semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi	Secara kegiatan semua sudah jalan hanya administrasi tentang pencatatan dan pelaporannya saja yang belum maksimal	Meningkatkan frekuensi pendampingan kepada KIM yang sudah terbentuk secara lebih intensif dan menyelenggarakan kegiatan diseminasi lebih terfokus.		
		Jumlah KIM yang aktif								5	5	7																	
		Jumlah KIM								32	32	32																	



NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	KINERJA	SATUAN	2018	2019					2020					N 2021 (%)	STATUS			N s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		TT	AT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	TT			100	TT			Jumlah LPP yang patuh terhadap norma siaran dibagi jumlah LPP dikali 100%	LPL (Pembkab) 1. LPS (swasta) 5. LPK (Komunitas) 1. LPPL TV 1	Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran)	Belum terselenggaranya workshop TOT Penyiaran karena terkendala Pandemi Covid-19	Meningkatkan kerjasama dengan LP di Kabupaten Temanggung dengan mengadakan kegiatan bersama
		Jumlah LPP dengan kategori patuh								8	8	8															
		Jumlah LPP								8	8	8															
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	59,49	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10			88,10		AT		88,10		AT	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	Jumlah OPD, Desa/Kel 395, Jumlah yang sudah terhubung 348	Cost sharing pengadaan peralatan jaringan diberapa desa yang didukung dengan alokasi dana untuk pembelian aset peralatan jaringan yang dianggarkan dari APBDes	- Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. - Beberapa UPT sudah dihapus dan tidak lagi masuk dalam organisasi perangkat daerah sehingga	Perambahan anggaran untuk pengadaan repeater yang dapat diakses untuk desa-desa	
		Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung jaringan dari Kaminfo								317	324	348															
		Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.								395	395	395															
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	7	15	20	30	40	50	13,23	16,17	16,99			56,64			UK	33,98		UK	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Jumlah Total SI: 500, SI terintegrasi : 76	Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan, PD secara mandiri telah memiliki akses internet dengan berlangganan ke ISP	Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh PD  penyebab prosentase integrasi aplikasi rendah atau tidak sesuai target, dikarenakan website yang sama atau sejenis penghitungannya 1 - 1 dalam istilah yang lain belum dikelompokkan menurut jenisnya. website yang dimaksud sbb : -Website SID = 289 (harusnya 1) -Website Kecamatan = 20 (harusnya 1) -Website OPD/Dinas/Badan = 23 (harusnya 1) -Website PPIID pembantu = 46 (harusnya 1) -Simpus = 26 (harusnya 1) -Website Puskesmas = 26 (harusnya 1) -Paten Kecamatan = 20 (harusnya 1) TOTAL pengurangan jumlah website = 443	Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD	
		Jumlah sistem informasi terintegrasi								61	82	87															
		Jumlah sistem informasi								461	507	512															
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	38	40	45	50	55	60	40,13	52,27	52,15			100,00	TT			86,91		AT	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Total SI: 500, SI berfungsi optimal : 258	Meningkatnya kemauan dan kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi	Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang	Penambahan SDM TIK dan diterbitkannya regulasi yang mengatur pengelolaan sistem informasi	
		Jumlah sistem informasi berfungsi optimal								185	265	267															
		Jumlah sistem informasi								461	507	512															







